

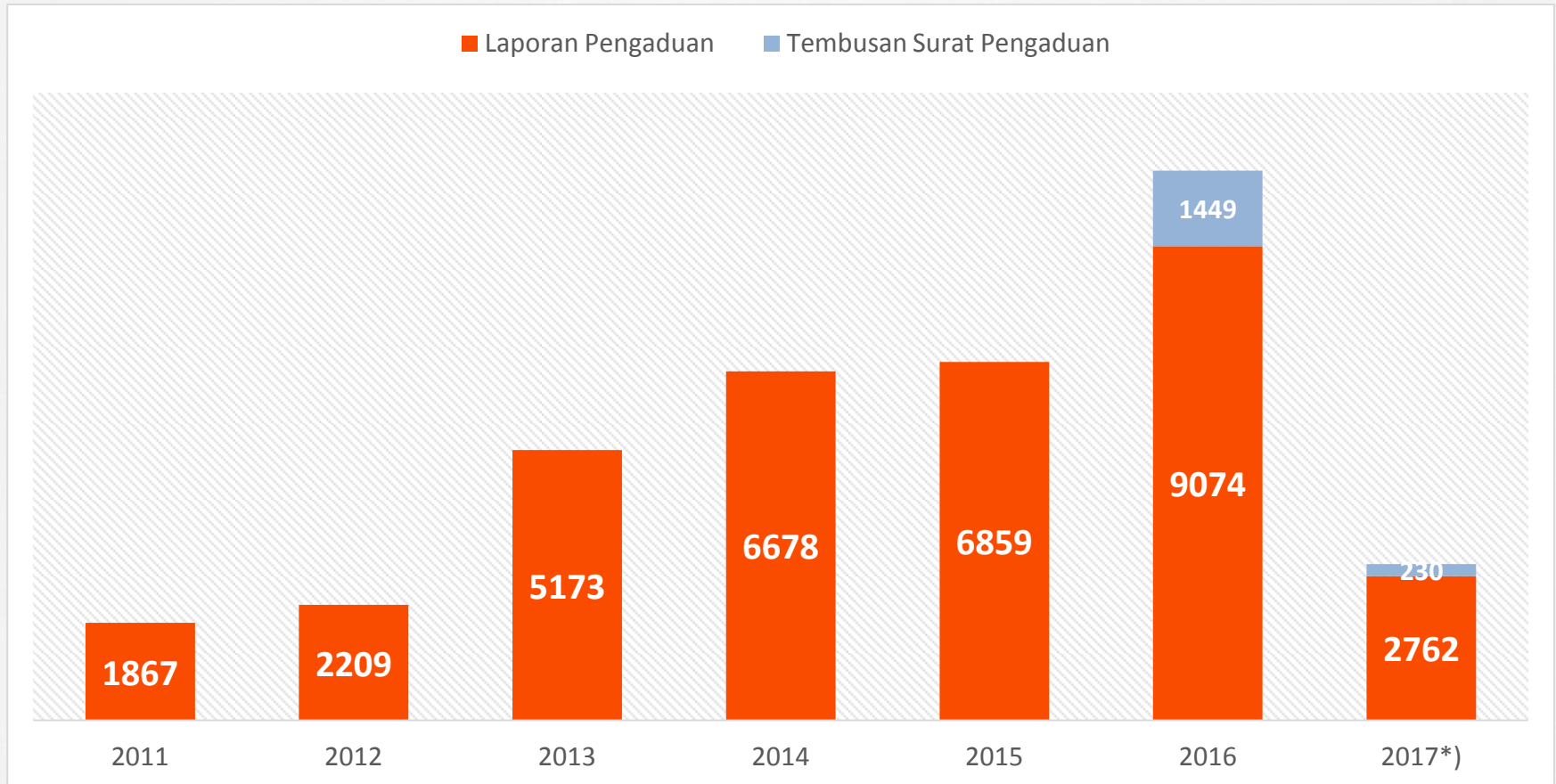


# **OMBUDSMAN**

## Republik Indonesia

**Data Penyelesaian  
Laporan Masyarakat  
Triwulan I Tahun 2017**  
(Periode 1 Jan – Maret 2017)

# Dinamika Jumlah Laporan Pertahun

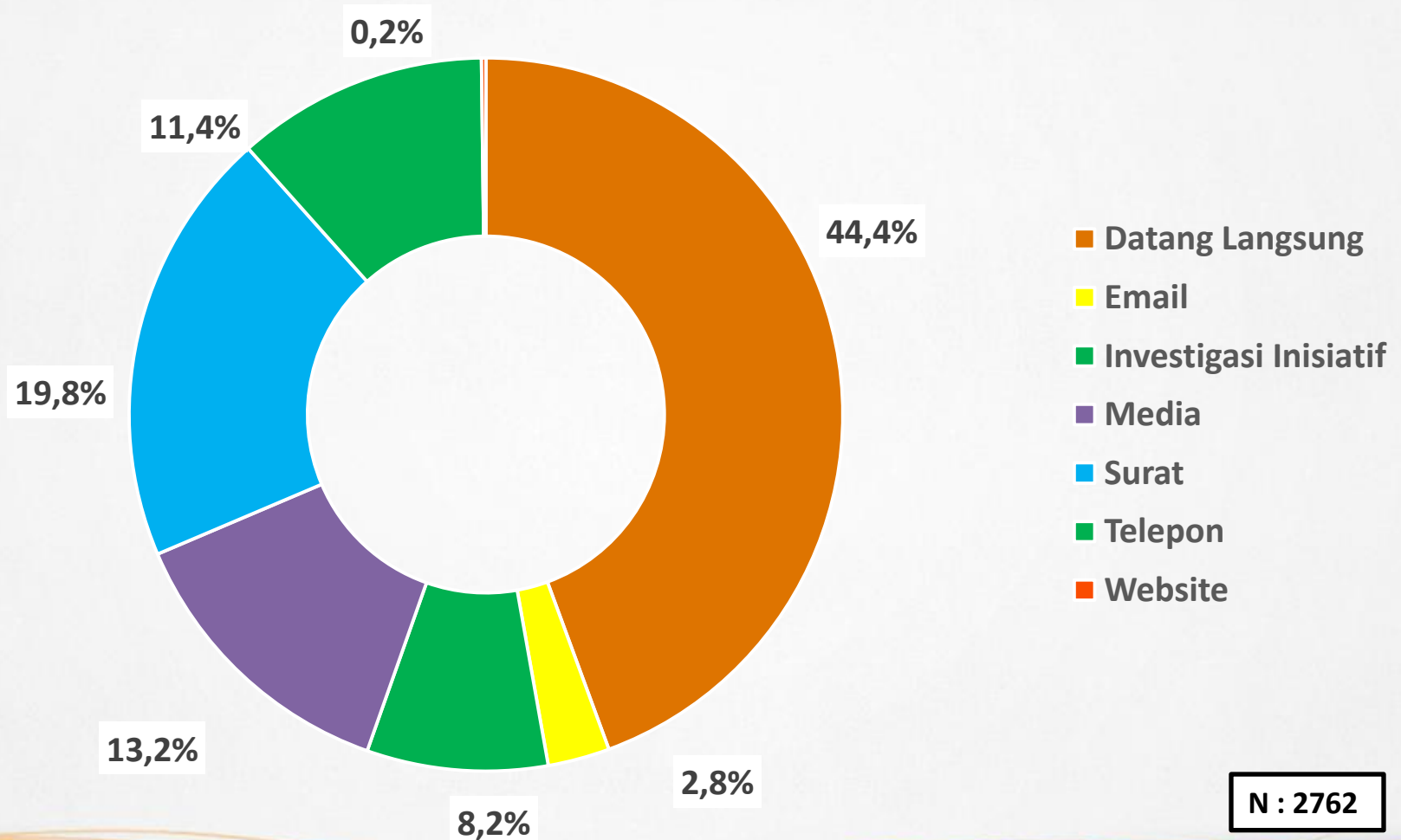


**NB : 2017 Data teregister sampai dengan Bulan Maret 2017**

**Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 31 Maret 2017**

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

# Mekanisme Penyampaian Laporan

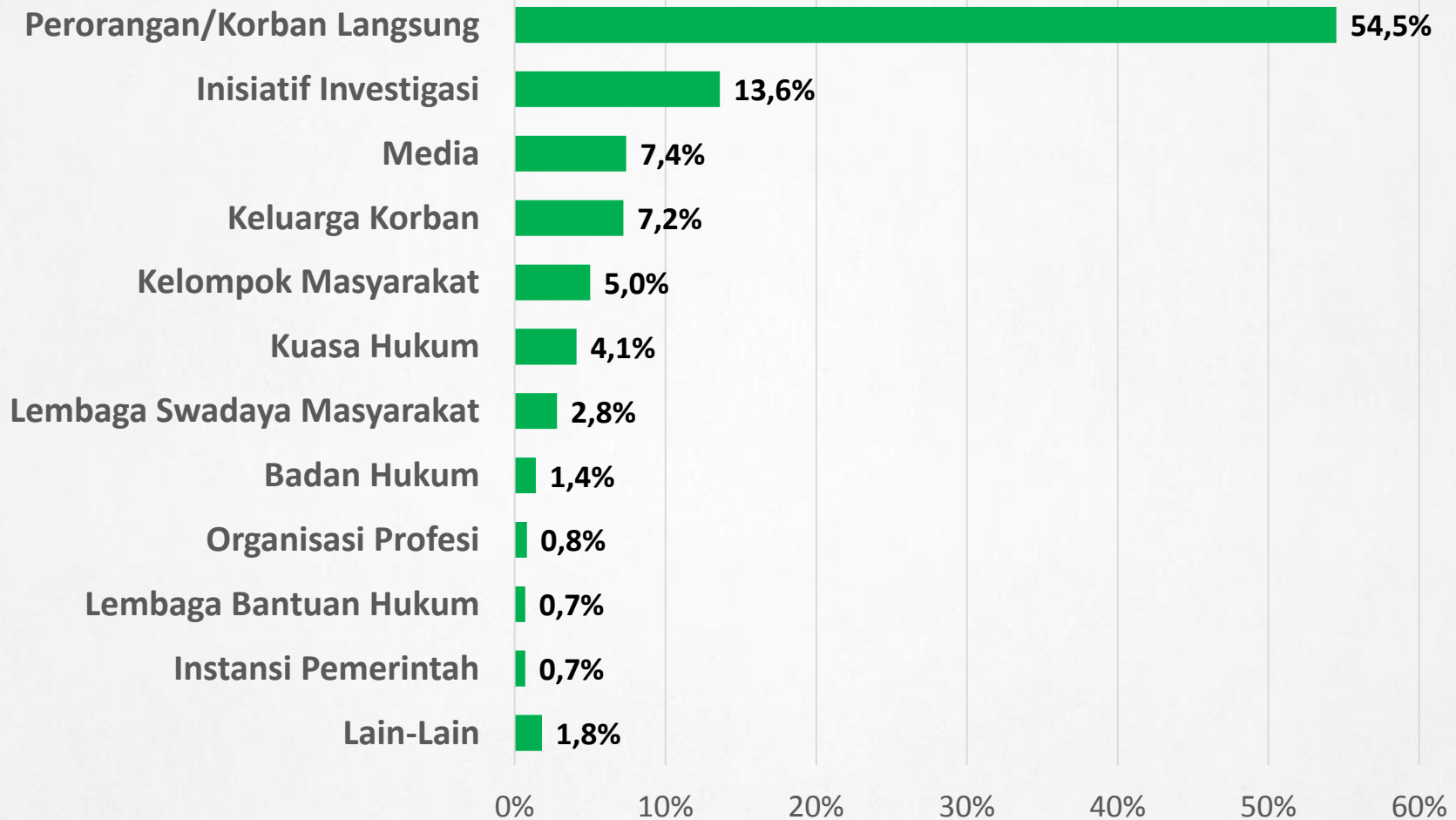


N : 2762

Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 31 Maret 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

# Klasifikasi Pelapor



Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 31 Maret 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

# Dugaan Maladministrasi



26,6%

734 Lap.  
Penundaan berlarut

19,4%

537 Lap. Penyimpangan  
Prosedur

20,1%

554 Lap. Tidak  
Memberikan Pelayanan

8,4%

233 Lap.  
Tidak Kompeten

9,2%

255 Lap. Penyalahgunaan  
Wewenang

8,8%

243 Lap. Permintaan  
Imbalan, Uang/Jasa

5,0%

138  
Tidak Patut

1,2%

34 Lap.  
Diskriminasi

0,6%

17 Lap.  
Berpihak

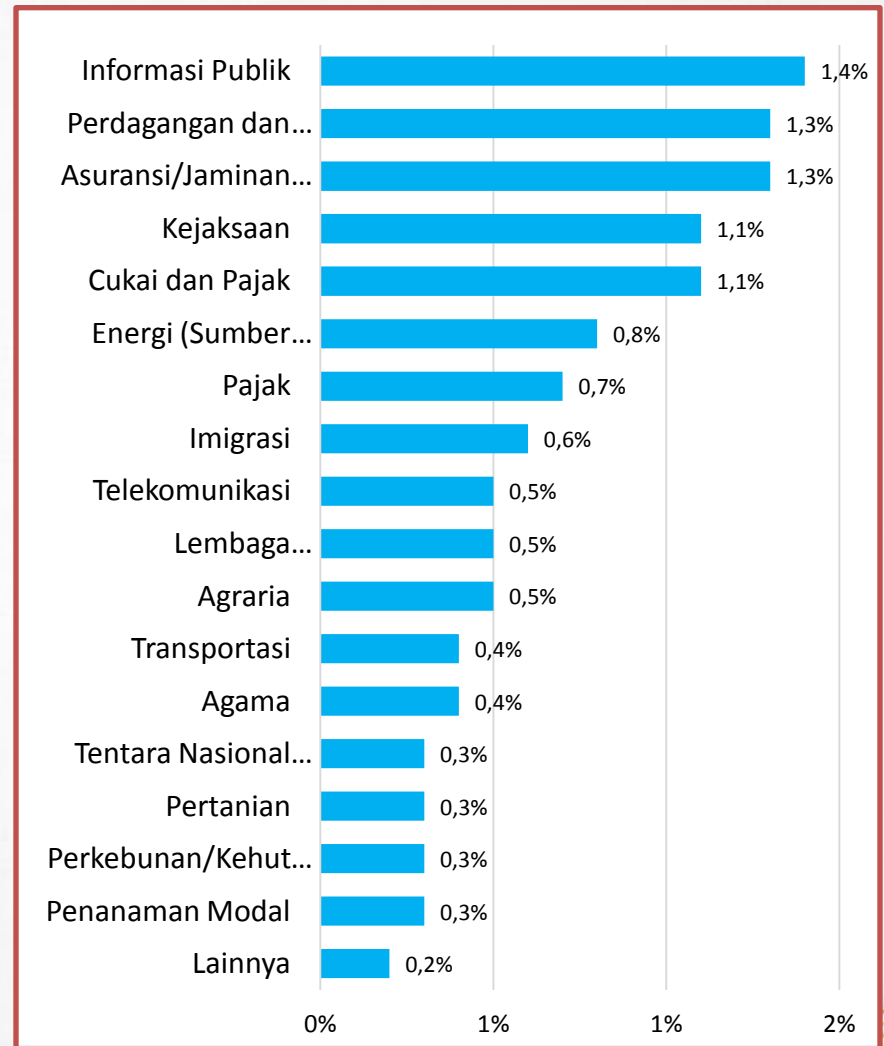
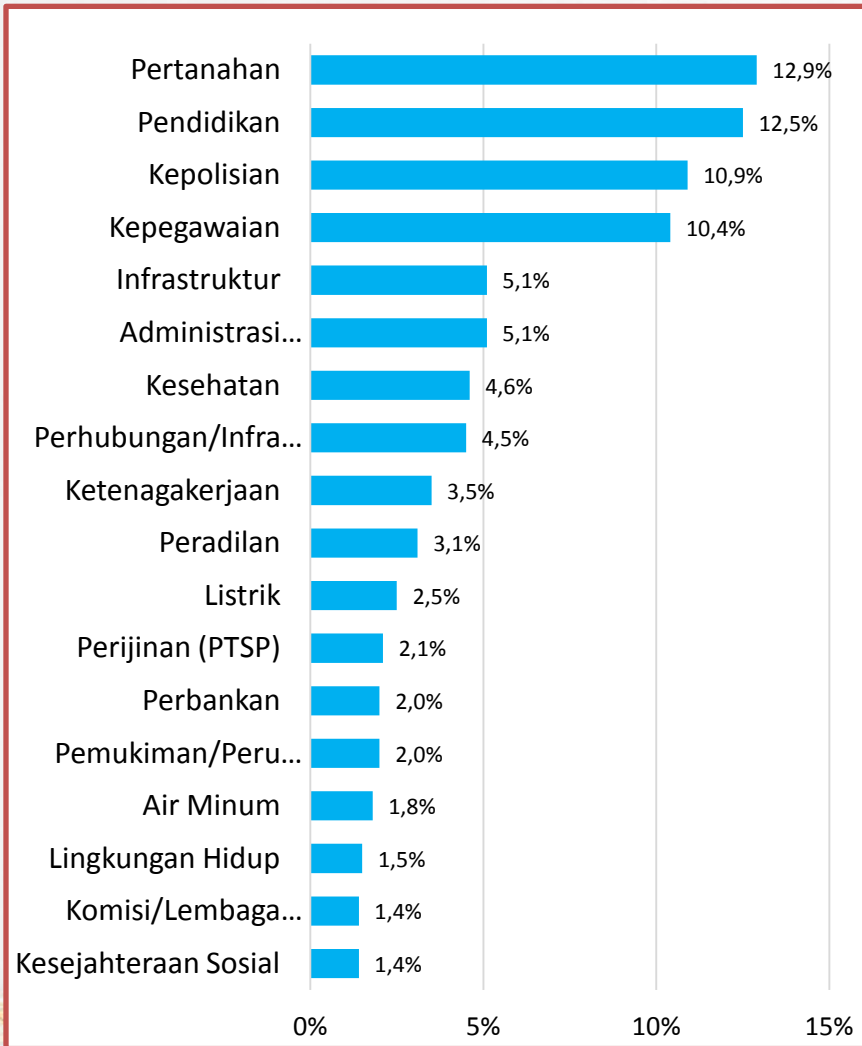
0,6%

17 Lap.  
Konflik Kepentingan

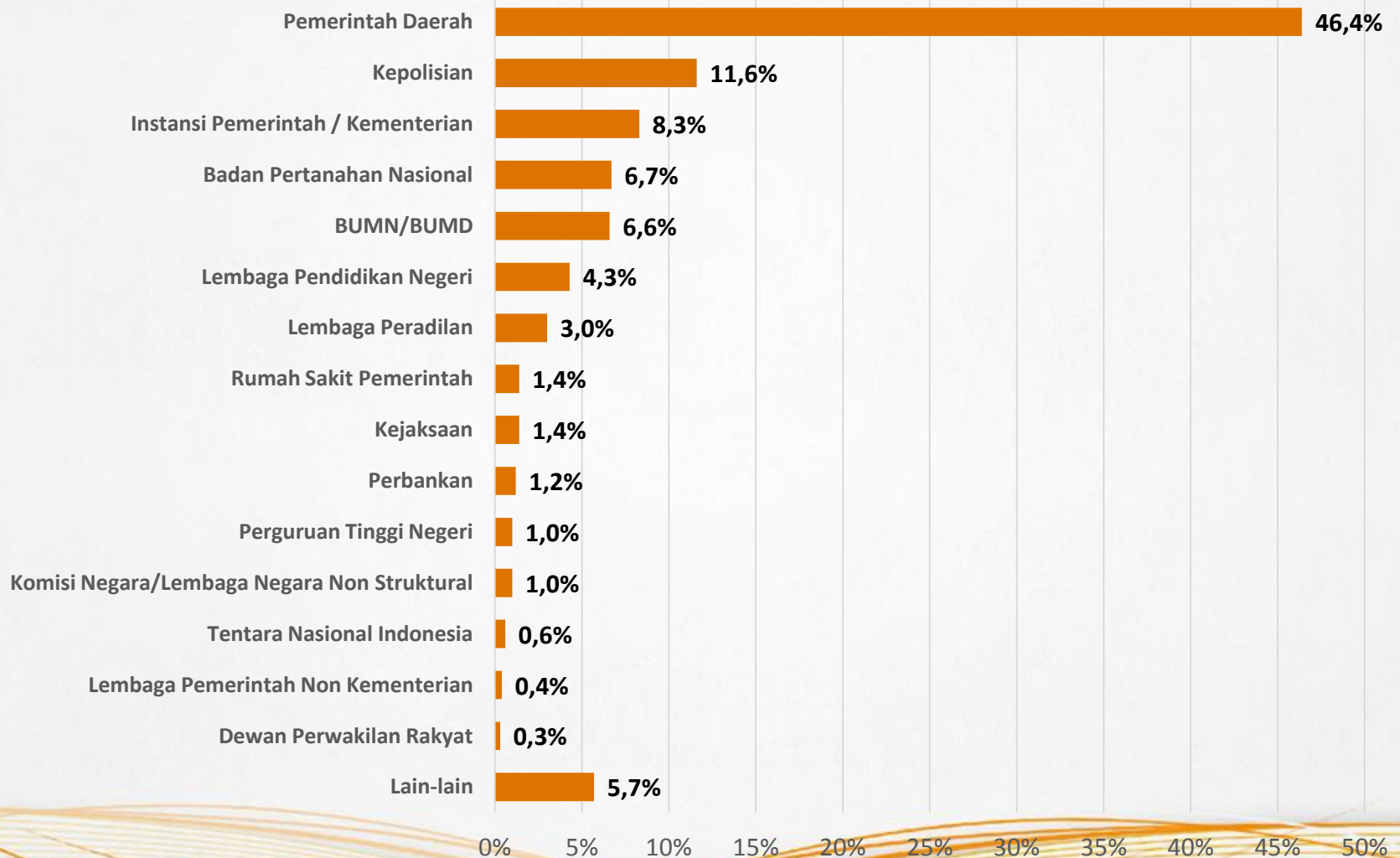
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 31 Maret 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

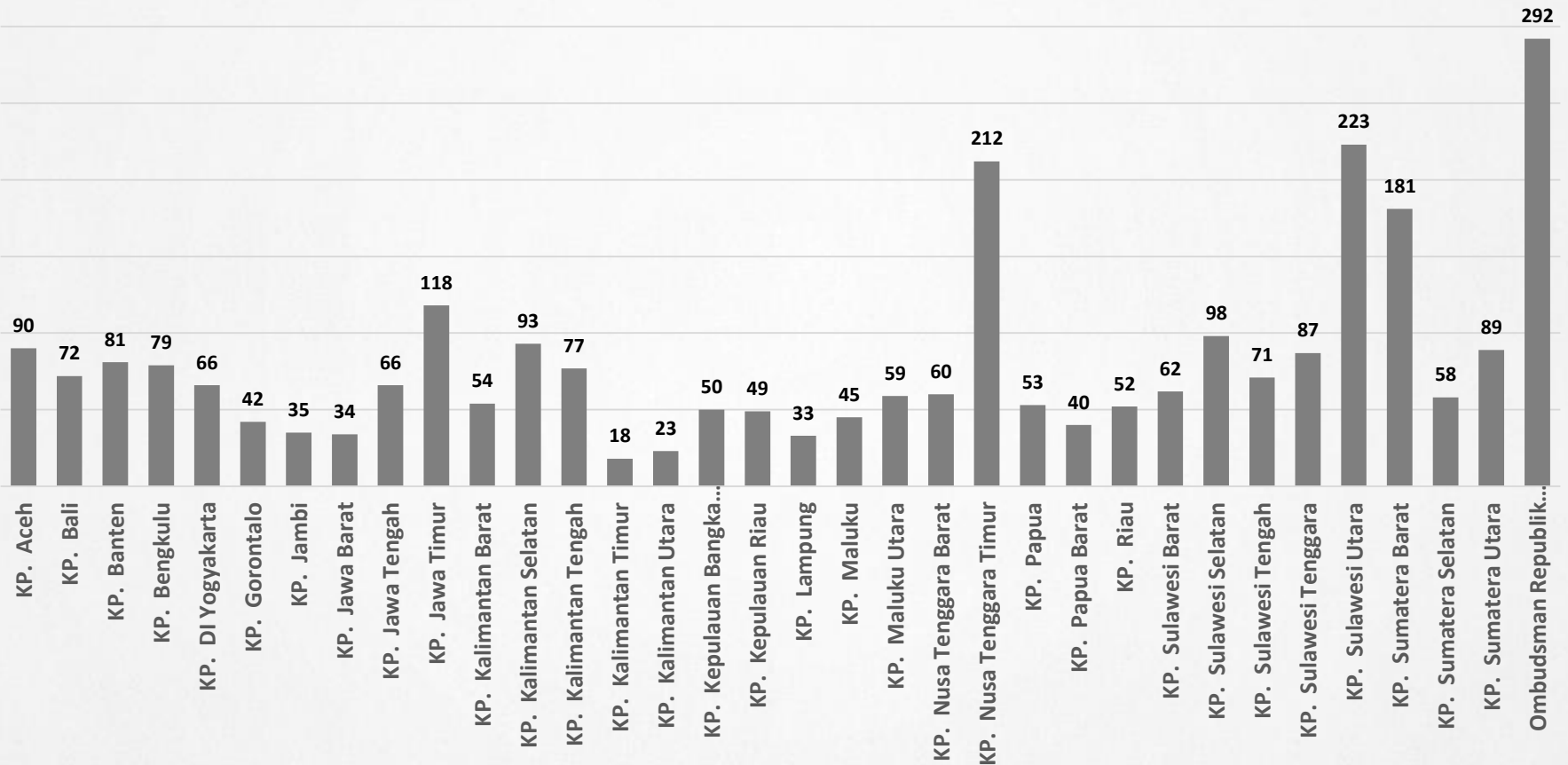
# Substansi Laporan



# Kelompok Instansi Terlapor



# Jumlah Sebaran Laporan di Tiap Kantor Perwakilan



Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 31 Maret 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik



## Sebaran Dugaan Maladministrasi pada Tiap Kelompok Instansi Terlapor selama periode tahun 2017

Kelompok Instansi Terlapor	Dugaan Maladministrasi										Total
	Berpihak	Diskriminasi	Konflik Kepentingan	Penundaan Berlarut	Penyalahgunaan Wewenang	Penyimpangan Prosedur	Pemintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa	Tidak Kompeten	Tidak Memberikan Pelayanan	Tidak Patut	
Badan Pertanahan Nasional	1.1%		1.6%	41.8%	8.2%	22.3%	3.8%	6.5%	13.0%	1.6%	100.0%
BUMN/BUMD	0.5%	1.1%	0.5%	19.7%	4.9%	23.0%	2.7%	16.9%	24.6%	6.0%	100.0%
Dewan Perwakilan Rakyat				14.3%		14.3%	28.6%	28.6%		14.3%	100.0%
Instansi Pemerintah / Kementerian		0.9%	0.9%	21.3%	13.0%	20.4%	8.7%	10.0%	20.0%	4.8%	100.0%
Kejaksaan				63.2%	10.5%	10.5%	7.9%	2.6%	2.6%	2.6%	100.0%
Kepolisian	0.9%	0.9%	0.9%	47.7%	7.8%	13.7%	2.2%	11.2%	10.6%	4.0%	100.0%
Komisi Negara/LNS				37.9%	6.9%	17.2%		24.1%	6.9%	6.9%	100.0%
Lembaga Pemerintah Non Kementerian		10.0%		50.0%		20.0%		10.0%	10.0%		100.0%
Lembaga Pendidikan Negeri			0.8%	2.5%	10.0%	20.0%	61.7%	0.8%	2.5%	1.7%	100.0%
Lembaga Peradilan	6.1%		1.2%	23.2%	13.4%	20.7%	8.5%	14.6%	7.3%	4.9%	100.0%
Pemerintah Daerah	0.4%	1.9%	0.4%	23.9%	9.0%	18.1%	8.3%	6.2%	27.3%	4.4%	100.0%
Perbankan				17.6%	11.8%	26.5%		20.6%	17.6%	5.9%	100.0%
Perguruan Tinggi Negeri				14.3%		50.0%	3.6%	3.6%	25.0%	3.6%	100.0%
Rumah Sakit Pemerintah				20.0%	2.5%	22.5%	2.5%	12.5%	20.0%	20.0%	100.0%
Tentara Nasional Indonesia				18.8%	56.3%				12.5%	12.5%	100.0%
Lain-lain	0.6%	1.3%	0.6%	17.7%	11.4%	29.1%	5.7%	8.9%	12.0%	12.7%	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>0.6%</b>	<b>1.2%</b>	<b>0.6%</b>	<b>26.6%</b>	<b>9.2%</b>	<b>19.4%</b>	<b>8.8%</b>	<b>8.4%</b>	<b>20.1%</b>	<b>5.0%</b>	<b>100.0%</b>

Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 31 Maret 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

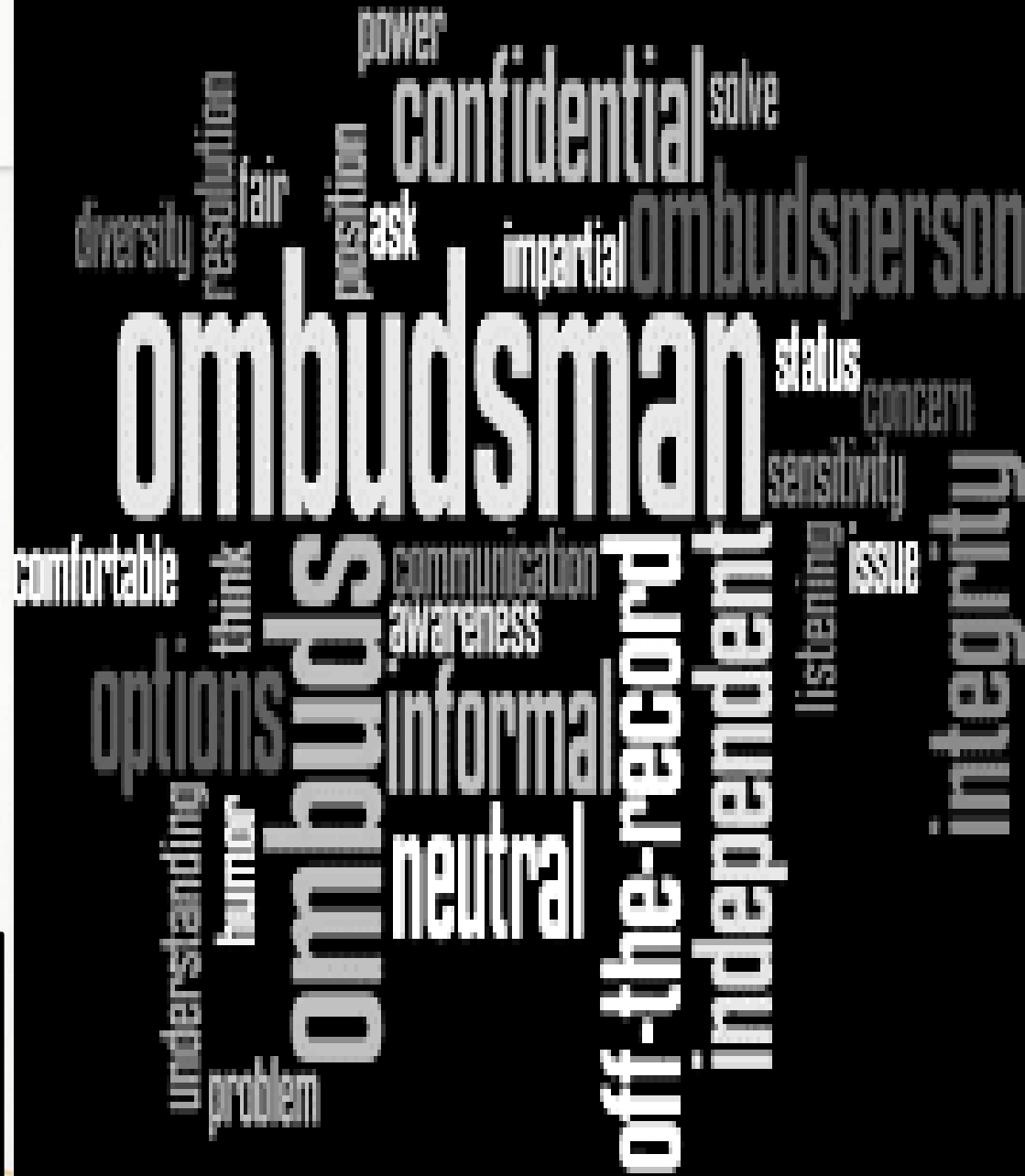
## Data Status Tindak Lanjut Laporan Selama Periode Tahun 2017

Status Penyelesaian Laporan	Jml	Total	Prosentase
Tidak Memenuhi Syarat Formil	6	1584 (telah diselesaikan)	57,3%
Bukan Wewenang	6		
Laporan telah diselesaikan	104		
Laporan Ditutup	1468		
Dalam Proses	1178	1178 (dalam Proses)	42,7%
<b>Total</b>	<b>2762</b>	<b>2762</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 31 Maret 2017

Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

TERIMA KASIH



Created By :

Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan  
Sistem Informasi Pelayanan Publik  
(PENTAS SI YANLIK).

Bidang Pencegahan - Ombudsman RI  
2017